



PEMERINTAH KABUPATEN
LAMONGAN

LAPORAN

PELAKSANAAN PENILAIAN RESIKO
TAHUN 2024

**DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat-Nya penyusunan Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Tahun 2024 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan. Manajemen risiko merupakan uraian tentang upaya BPKAD untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan uraian tentang upaya pemerintah untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran dengan menggunakan kebijakan dan prosedur untuk meminimalkan risiko, yang meliputi upaya penguatan lingkungan pengendalian dan penguatan struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi untuk mengendalikan risiko.

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) mengacu kepada lima unsur pengendalian intern yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, komunikasi dan informasi, dan pemantauan/monitoring. Informasi untuk mempersiapkan rencana tindak pengendalian intern diperoleh dari hasil evaluasi, penilaian, atau pemetaan atas sistem pengendalian intern yang ada, dengan memperhatikan struktur dan praktik tata kelola organisasi.

Dokumen pelaksanaan penilaian risiko merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan sistem pengendalian intern yang akan menjadi titik awal dalam pengembangan SPIP dalam suatu instansi pemerintah. Dengan adanya dokumen tersebut diharapkan pimpinan dan seluruh pegawai di lingkungan BPKAD Kabupaten Lamongan memiliki kesamaan persepsi dalam membangun dan menginternalisasikan SPIP dalam pelaksanaan tugas.

Lamongan, April 2024
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN

SITI RUBUKAH, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700607 199803 2 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
I. PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM	2
C. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
D. RUANG LINGKUP	3
II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN	3
A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI	3
B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN	4
III. PENILAIAN RESIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN	4
A. PENETAPAN KONTEKS / TUJUAN.....	4
B. HASIL IDENTIFIKASI RESIKO	5
C. HASIL ANALISIS RESIKO.....	8
D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN	15
E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN.....	14
IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI	18
V. RANCANGAN PEMANTAUAN	19
VI. PENUTUP	20

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pengertian manajemen risiko suatu proses identifikasi, analisis, penilaian, pengendalian, dan upaya menghindari, meminimalisir atau bahkan menghapus risiko yang tidak dapat diterima. Risiko berhubungan dengan pendekatan atau metodologi dalam menghadapi ketidakpastian, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan dari suatu tindakan.

Ketidakpastian ini berupa ancaman, pengembangan strategi dan mitigasi risiko. Manajemen risiko adalah suatu proses perencanaan, pengaturan, pemimpinan, dan pengontrolan aktivitas sebuah organisasi. Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Manajemen risiko juga dapat disebut sebagai salah satu cara untuk mengorganisir suatu risiko yang nantinya akan dihadapi baik itu sudah diketahui atau belum diketahui yang tidak terpikirkan dengan memindahkan risiko kepada pihak lain atau mengurangi efek negatif dari risiko dan menampung baik sebagian atau semua konsekuensi risiko dari beberapa aktifitas manusia.

Dimana proses manajemen risiko yang meliputi penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Oleh sebab itu melalui manajemen risiko diharapkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian dapat diminimalisir atau bahkan dapat dihilangkan karena setiap kegiatan pasti ada risiko yang akan ditimbulkan.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan menetapkan 1 (satu) tujuan yaitu Meningkatkan Belanja Wisatawan dan Masyarakat yang berbudaya. Untuk menunjang pencapaian tujuan strategis tersebut disusunlah peta strategi yang terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis yaitu (1) Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ; (2) Meningkatkan Pengembangan Seni dan Budaya ; dan (3) Meningkatnya manajemen internal Perangkat Daerah .

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan sebagai penunjang urusan pemerintah unsur pariwisata dan unsur kebudayaan menyadari sepenuhnya akan pentingnya pengelolaan resiko beserta tindakan pengendalian yang diperlukan. Di dorong dengan adanya kesadaran tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan

akan selalu melakukan monitoring dalam pengendalian resiko yang terjadi baik operasional maupun strategis. Hal tersebut dilakukan agar pengendalian resiko yang dibangun efektif dan efisien dalam rangka Upaya mengamankan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
6. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis

- organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
 - d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
 - e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
 - f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
 - g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

D. RUANG LINGKUP

Manajemen risiko pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan dilakukan dengan ruang lingkup dokumen, sumber daya manusia, dan lingkungan yang meliputi :

- Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola risikonya ;
- Identifikasi risiko ;
- Analisis risiko ;
- Evaluasi risiko ;
- Pengendalian risiko ;
- Pemantauan dan telaah ulang ;
- Koordinasi dan komunikasi.

II. PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

A. KONDISI LINGKUNGAN PENGENDALIAN SAAT INI

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah Menyusun kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang mungkin dapat terjadi sesuai dengan yang telah direncanakan setiap tahunnya. Kegiatan pengendalian dilakukukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa Tindakan mengatasi resiko telah dilakukan secara efektif.

Untuk dapat melihat nilai efektifitas dari pengendalian resiko yang telah direncanakan, maka dilakukan penilaian survei persepsi kepada seluruh pegawai mulai dari staf hingga pejabat eselon mengenai hasil penilaian pengendalian resiko pada unit kerja urusan keuangan.

Hasil penilaian yang telah dilakukan yakni dalam penegakan integritas dan nilai etika, kepemimpinan yang kondusif, pembentukan

struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan, pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat mengenai pembinaan sumber daya manusia, perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif, serta hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait telah memiliki hasil penilaian yang baik dan memadai baik dari hasil review dokumen maupun hasil survei persepsi.

Sedangkan untuk hasil penilaian terkait komitmen terhadap kompetensi apabila dari hasil review dokumen telah cukup memadai namun dari hasil survei persepsi masih kurang memadai.

B. RENCANA PERBAIKAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan melaksanakan kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko pada tiap tribulan. Pemantauan pengendalian resiko pada dasarnya adalah untuk memastikan apakah sistem pengendalian resiko yang ada telah berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Strategi yang dilakukan guna meningkatkan nilai hasil survei persepsi terkait komitmen terhadap kompetensi yakni dengan peningkatan kompetensi pegawai baik terkait pengelolaan dasar keuangan maupun pengelolaan resiko secara terintegrasi dan berkala. Hal ini diharapkan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan resiko yang baik di unit kerja masing-masing pegawai.

III. PENILAIAN RESIKO DAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

A. PENETAPAN KONTEKS / TUJUAN

Dalam penetapan tujuan perangkat daerah, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah memperhatikan dan mengacu pada RPJMD. Adapun Sasaran RPJMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yakni “Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi secara Inklusif melalui Optimalisasi Potensi Sektor Unggulan” dan “Meningkatkan Kesejahteraan dan Harmonisasi Sosial masyarakat yang Memperhatikan Kearifan Lokal”. Sehingga tujuan dari Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan adalah “Meningkatkan Belanja Wisatawan dan Masyarakat yang berbudaya”.

Setelah menetapkan tujuan maka perlu untuk menetapkan Sasaran. Agar bisa mendapatkan hasil nyata dan terukur dalam waktu

tahunan maka sasaran dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan yang ditetapkan adalah “ (1) Meningkatnya Kunjungan Wisatawan; (2) Meningkatnya Pengembangan Seni dan Budaya; dan (3) Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah”.

B. HASIL IDENTIFIKASI RESIKO

Penilaian resiko adalah kegiatan penilaian terhadap kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Kegiatan penilaian resiko dilaksanakan melalui aktivitas identifikasi resiko dengan menggunakan metodologi dan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko organisasi perangkat daerah.

Dalam pelaksanaan proses identifikasi resiko, perlu memperhatikan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa suatu resiko. Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah menyusun hasil identifikasi resiko baik resiko strategis maupun resiko operasional, uraian identifikasi resiko sebagai berikut :

Tabel III.1 Identifikasi Risiko Strategis OPD

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Resiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	% Peningkatan Kunjungan Wisatawan	Menurunnya Kunjungan Wisatawan	RSO.24.26.18.01	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kurang Maksimalnya Promosi Pariwisata	Internal	C	Turunnya PAD di Sektor Wisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Masyarakat
		% Peningkatan Retribusi Pariwisata	Praktik Penarikan Retribusi yang tidak sesuai ketentuan	RSO.24.26.18.02	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	itidak tidak baik dari oknum bersangkutan	Internal	C	Kerugian Keuangan Negara	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Masyarakat
2	Meningkatnya Pengembangan Seni dan Budaya	% Seni, Budaya Lokal, dan Benda/Situs Cagar Budaya yang dilestarikan	Menurunnya Kegiatan Pelestarian Kesenian, Budaya Lokal, dan Benda Situs Cagar Budaya Yang Dilestarika	RSO.24.22.18.01	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Menurunnya Kesadaran Masyarakat Atas Pentingnya Pelestarian Seni, Budaya Lokal, dan Bendasitus Cagar Budaya	Eksternal	C	Terjadinya Kelangkaan atas Kesenian, Budaya Lokal, dan Benda Situs Cagar Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Masyarakat
3	Meningkatnya Manajemen Internal Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Menurunnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	RSO.24.22.18.02	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Komitmen PD Dalam Mencapai Target Kinerja Masih Rendah	Internal	C	Tingkat Kepercayaan Masyarakat Lamongan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Menurun	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Masyarakat

Tabel III.2 Identifikasi Risiko Operasional OPD

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Resiko				Sebab		C/UC	Dampak	
			Tahap	Uraian	Kode Resiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak Yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l
1	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Ju	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dikelola	Pelaksanaan	Kerusakan SARPRAS di ODTW	ROO.24.26.18.01	Kepala Bidang Pariwisata	Usia sarpras sudah melebihi masa manfaat	Internal	C	Ketidak nyamanan pengunjung/ wisatawan di ODTW	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Masyarakat
2	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikelola	Pelaksanaan	Bencana Alam	ROO.24.26.18.02	Kepala Bidang Pariwisata	Cuaca Extrim	Eksternal	UC	Rusak Sarana/ Prasarana atau Fasilitas Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Masyarakat
3	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten /Kota	Jumlah Usaha Pariwisata yang dibina dan dimonitoring	Pelaksanaan	Terbatasnya Informasi terkait Usaha Pariwisata	ROO.24.26.18.03	Kepala Bidang Pariwisata	Usaha Pariwisata Kurang Kooperatif dalam penyampaian data	Eksternal	C	Terhambatnya Kegiatan Pelaporan Informasi Pariwisata kepada Stakeholder (Pemerintah Daerah, BPS, dll)	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Masyarakat
4	Pemasaran Pariwisata Dalam Dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Promosi Event Daerah yang Terlaksana	Pelaksanaan	Kurang Maksimalnya Promosi Wisata	ROO.24.26.18.04	Kepala Bidang Pemasaran	Kurang Terintegrasinya Dukungan Dari Stakeholder (Dinas, Pengelola Wisata, dan	Eksternal	C	Promosi Pariwisata Tersaji Kurang Informatif	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Masyarakat
5	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata yang Dibina	Pelaksanaan	Kurang Berkembangnya SDM Pariwisata dan Ekraf	ROO.24.26.18.05	Kepala Bidang Pemasaran	Kurangnya Kegiatan BIMTEK Peningkatan Kapasitas SDM	Eksternal	C	Menghambat Perkembangan Pariwisata dan Ekraf	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Masyarakat
6	Pengelolaan Kebudayaan Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Upacara Adat yang Dilaksanakan	Pelaksanaan	Minimnya Pengelolaan Kegiatan Tradisi Budaya	ROO.24.22.18.01	Kepala Bidang Kebudayaan	Terbatasnya Dukungan Fasilitas Kegiatan Tradisi Budaya	Eksternal	C	Berkurangnya Intensitas Kegiatan Tradisi Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Masyarakat
7	Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penampilan Kesenian Tradisional Lamongan Dalam Pertunjukan Tingkat Kab, Regional, Nasional, Internasional	Pelaksanaan	Minimnya Event Kesenian Bagi Kelompok Seni	ROO.24.22.18.02	Kepala Bidang Kebudayaan	Terbatasnya Dukungan fasilitas Kegiatan Kesenian Tradisional	Eksternal	C	Vakumnya Beberapa organisasi Seni dan Sulit Berkembangnya Kelompok Seni Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Masyarakat
8	Pembinaan Kesenian Yang Masyarakat Pelakunya Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pembinaan Kesenian Tradisional	Pelaksanaan	Kurangnya Kualitas SDM Kelompok Seni	ROO.24.22.18.03	Kepala Bidang Kebudayaan	Minimnya Ruang Pembinaan Kesenian	Eksternal	C	Minimnya Daya Saing SDM Seni	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Masyarakat
9	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola	Pelaksanaan	Kurangnya SDM Profesional Dalam Bidang Cagar Budaya	ROO.24.22.18.04	Kepala Bidang Kebudayaan	Terdapat Kualifikasi/ Standar Yang Harus Dipenuhi Oleh SDM Pada Bidang Cagar	Eksternal	C	Terhambatnya Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Masyarakat
10	Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	Jumlah Museum yang Dikelola	Pelaksanaan	Museum kurang maksimal dalam beroperasi	ROO.24.22.18.05	Kepala Bidang Kebudayaan	Terdapat Fasilitas Museum yang belum terpenuhi	Internal	C	Pelayanan Terhadap Pengunjung Museum Kurang Maksimal	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Masyarakat

C. HASIL ANALISIS RESIKO

Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya, untuk menetapkan level atau status risikonya. Analisis resiko dibutuhkan guna mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa resiko dan dampak yang ditimbulkan. Serta menetapkan skala dan status resiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak resiko.

Pengukuran dimensi kemungkinan kejadian resiko dan konsekuensi atau dampak risiko menggunakan 5 (lima) tingkatan, sebagai berikut:

Tabel III.3 Kriteria Kemungkinan Resiko

Kriteria Resiko	
Kriteria Kemungkinan	
Nilai Kemungkinan	Keterangan
1	Sangat Jarang
2	Jarang
3	Kadang-Kadang
4	Sering
5	Sangat Sering

Tabel III.4 Kriteria Konsekuensi / Dampak Resiko

Kriteria Resiko	
Kriteria Dampak Resiko	
Nilai Dampak	Keterangan
1	Tidak Signifikan
2	Kurang Signifikan
3	Sedang
4	Signifikan
5	Sangat Signifikan

Setelah mengetahui tingkatan skala atau level dari kemungkinan dan dampak resiko. Maka perlu juga mengetahui tingkatan resiko, tingkatan resiko adalah hasil perkalian nilai bahaya dengan nilai potensi terjadinya bahaya. Pengukuran tingkatan resiko diperlukan guna mengetahui dan menetapkan status resiko yang akan di uraikan. Perhitungan nilai tingkatan resiko sebagai berikut :

Dari tabel penilaian analisis tersebut Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan telah menyusun analisis resiko berdasarkan penilaian hasil dari survei responden pada masing-masing pegawai, mulai dari staf – eselon sesuai urutan kategori baik analisis resiko strategis maupun resiko operasional Urusan Pariwisata sebagai berikut :

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
Risiko Strategis OPD							
1	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Menurunnya Kunjungan Wisatawan	RSO.24.26.18.01	4	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Kurang Maksimalnya Promosi Pariwisata	Turunya PAD di Sektor Wisata
2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Praktik Penarikan Retribusi yang tidak sesuai ketentuan	RSO.24.26.18.02	4	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	itikad tidak baik dari oknum bersangkutan	Kerugian Keuangan Negara

Gambar 1 Lampiran Form 4 Kertas Kerja Analisis Resiko Strategis Si Mario Urusan Pariwisata

Risiko Operasional OPD							
1	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kerusakan SARPRAS di ODTW	ROO.24.26.18.01	4	Kepala Bidang Pariwisata	Usia sarpras sudah melebihi masa manfaat	Ketidak nyamanan pengunjung/ wisatawan di ODTW
2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Bencana Alam	ROO.24.26.18.02	6	Kepala Bidang Pariwisata	Cuaca Extrim	Rusak Sarana/ Prasarana atau Fasilitas Destinasi Pariwisata
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Terbatasnya Informasi terkait Usaha Pariwisata	ROO.24.26.18.03	5	Kepala Bidang Pariwisata	Usaha Pariwisata Kurang Kooperatif dalam penyampaian data	Terhambatnya Kegiatan Pelaporan Informasi Pariwisata kepada Stakeholder (Pemerintah Daerah, BPS, dll)
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kurang Maksimalnya Promosi Wisata	ROO.24.26.18.04	4	Kepala Bidang Pemasaran	Kurang Terintegrasinya Dukungan Dari Stakeholder (Dinas, Pengelola Wisata, dan Pihak Ke-3)	Promosi Pariwisata Tersaji Kurang Informatif
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kurang Berkembangnya SDM Pariwisata dan Ekraf	ROO.24.26.18.05	4	Kepala Bidang Pemasaran	Kurangnya Kegiatan BIMTEK Peningkatan Kapasitas SDM	Menghambat Perkembangan Pariwisata dan Ekraf

Gambar 2 Lampiran Form 4 Kertas Kerja Analisis Resiko Operasional Si Mario Urusan Pariwisata

Selain analisis resiko strategis maupun resiko operasional Urusan Pariwisata Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lamongan juga menyusun analisis resiko berdasarkan penilaian hasil dari survei responden pada masing-masing pegawai, mulai dari staf – eselon sesuai urutan kategori baik analisis resiko strategis maupun resiko operasional pada urusan kebudayaan sebagai berikut

No	Entitas	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
Risiko Strategis OPD							
1	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Menurunnya Kegiatan Pelestarian Kesenian, Budaya Lokal, dan Benda Situs Cagar Budaya Yang Dilestarikan	RSO.24.22.18.01	5	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Menurunnya Kesadaran Masyarakat Atas Pentingnya Pelestarian Seni, Budaya Lokal, dan Benda situs Cagar Budaya	Terjadinya Kelangkaan atas Kesenian, Budaya Lokal, dan Benda Situs Cagar Budaya
2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Menurunnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	RSO.24.22.18.02	4	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	Komitmen PD Dalam Mencapai Target Kinerja Masih Rendah	Tingkat Kepercayaan Masyarakat Lamongan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Menurun

Gambar 3 Lampiran Form 4 Kertas Kerja Analisis Resiko Strategis Si Mario
Urusan Kebudayaan

Risiko Operasional OPD

1	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Minimnya Pengelolaan Kegiatan Tradisi Budaya	ROO.24.22.18.01	4	Kepala Bidang Kebudayaan	Terbatasnya Dukungan Fasilitasi Kegiatan Tradisi Budaya	Berkurangnya Intensitas Kegiatan Tradisi Budaya
2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Minimnya Event Kesenian Bagi Kelompok Seni	ROO.24.22.18.02	3	Kepala Bidang Kebudayaan	Terbatasnya Dukungan fasilitasi Kegiatan Keseniat Tradisional	Vakumnya Beberapa organisasi Seni dan Sulit Berkembangnya Kelompok Seni
3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kurangnya Kualitas SDM Kelompok Seni	ROO.24.22.18.03	3	Kepala Bidang Kebudayaan	Minimnya Ruang Pembinaan Kesenian	Minimnya Daya Saing SDM Seni
4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kurangnya SDM Profesional Dalam Bidang Cagar Budaya	ROO.24.22.18.04	9	Kepala Bidang Kebudayaan	Terdapat Kualifikasi/ Standar Yang Harus Dipenuhi Oleh SDM Pada Bidang Cagar Budaya	Terhambatnya Kegiatan Pengelolaan Cagar Budaya
5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Museum kurang maksimal dalam beroperasi	ROO.24.22.18.05	4	Kepala Bidang Kebudayaan	Terdapat Fasilitas Museum yang belum terpenuhi	Pelayanan Terhadap Pengunjung Museum Kurang Maksimal

Gambar 4 Lampiran Form 4 Kertas Kerja Analisis Resiko Operasional Si Mario

Urusan Kebudayaan

Dari kedua gambar hasil analisis resiko yang telah dibuat dapat disimpulkan bahwa terkait hasil analisis resiko strategis pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Resiko menurunnya Kunjungan Pariwisata memiliki nilai skala resiko sebesar 4 dengan warna hijau, yang artinya memiliki kemungkinan jarang terjadi, dampak yang dihasilkan kurang signifikan dan resiko yang dimiliki tergolong rendah.
2. Resiko Praktik Penarikan Retribusi yang Tidak Sesuai Ketentuan memiliki nilai skala resiko sebesar 4 dengan warna hijau, yang artinya memiliki kemungkinan jarang terjadi, dampak yang dihasilkan kurang signifikan dan resiko yang dimiliki tergolong rendah.
3. Resiko Menurunnya Kegiatan Pelestarian Kesenian, Budaya Lokal dan Benda Situs Cagar Budaya yang Dilestarikan memiliki nilai skala resiko sebesar 5 dengan warna kuning, yang artinya memiliki kemungkinan sangat jarang terjadi, dampak yang dihasilkan sangat signifikan dan resiko yang dimiliki tergolong sedang.
4. Resiko menurunnya Nilai SAKIP Perangkat daerah memiliki nilai sebesar 4 dengan warna hijau, yang artinya memiliki kemungkinan jarang terjadi, dampak yang dihasilkan kurang signifikan dan resiko yang dimiliki tergolong rendah.

Dan terkait gambar hasil analisis resiko operasional pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Resiko Kerusakan SARPRAS di ODTW memiliki nilai skala resiko sebesar 4 dengan warna hijau, yang artinya memiliki kemungkinan jarang terjadi, dampak yang dihasilkan kurang signifikan sehingga resiko yang dimiliki tergolong rendah.
2. Resiko Bencana Alam memiliki nilai skala resiko sebesar 6 dengan warna kuning, yang artinya memiliki kemungkinan Jarang terjadi, dampak yang dihasilkan sedang dan resiko yang dimiliki tergolong sedang.
3. Resiko Terbatasnya informasi terkait usaha pariwisata memiliki nilai skala resiko sebesar 5 dengan warna kuning, yang artinya memiliki kemungkinan sangat jarang terjadi, dampak yang dihasilkan sangat signifikan dan resiko yang dimiliki tergolong sedang.
4. Resiko kurang maksimalnya promosi wisata memiliki nilai skala

resiko sebesar 4 dengan warna hijau, yang artinya memiliki kemungkinan jarang terjadi, dampak yang dihasilkan kurang signifikan sehingga resiko yang dimiliki tergolong rendah.

5. Resiko Kurang Berkembangnya SDM Pariwisata dan Ekraf memiliki nilai skala resiko 4 dengan warna hijau, yang artinya memiliki kemungkinan jarang terjadi, dampak yang dihasilkan kurang signifikan sehingga resiko yang dimiliki tergolong rendah.
6. Resiko Minimnya Pengelolaan kegiatan tradisi budaya memiliki nilai skala resiko 4 dengan warna hijau, yang artinya memiliki kemungkinan jarang terjadi, dampak yang dihasilkan kurang signifikan dan resiko yang dimiliki tergolong rendah.
7. Resiko Minimnya Event Kesenian Bagi Kelompok seni memiliki nilai skala resiko 3 dengan warna hijau, yang artinya memiliki kemungkinan sangatn jarang terjadi, dampak yang dihasilkan tergolong sedang dan resiko yang dimiliki rendah
8. Resiko Kurangnya Kualitas SDM Kelompok Seni memiliki skala resiko 3 dengan warna hijau, yang artinya memiliki kemungkinan sangat jarang terjadi, dampak yang dihasilkan tergolong sedang dan resiko yang dimiliki rendah.
9. Resiko Kurangnya SDM Profesional dalam Bidang Cagar Budaya memiliki skala resiko 9 dengan warna oranye, yang artinya kemungkinan kadang-kadang terjadi, dampak yang dihasilkan tergolong sedang dan resiko yang dimiliki tinggi.
10. Resiko Museum kurang maksimal dalam beroperasi memiliki skala resiko 4 dengan warna hijau , yang artinya memiliki kemungkinan jarang terjadi, dampak yang dihasilkan kurang signifikan dan resiko yang dimiliki tergolong rendah.

D. PENGENDALIAN YANG SUDAH DILAKUKAN

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang dipandang tepat untuk dilakukan dalam rangka mengatasi risiko. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian, juga ditetapkan dan dilaksanakan kebijakan serta prosedur, guna memastikan bahwa tindakan yang dilakukan untuk mengatasi risiko telah bekerja secara efektif. Kegiatan yang sudah dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lamongan untuk mengatasi resiko strategis sebagai berikut :

1. Menurunnya kunjungan wisatawan dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni Penggunaan berbagai media untuk promosi wisata baik media cetak, elektronik, online, media sosial.

2. Praktik Penarikan Retribusi yang tidak sesuai ketentuan dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni SOP Penerimaan dan Penyetoran Retribusi dan PERDA No. 10 Tahun 2023.
3. Menurunnya Kegiatan Pelestarian Kesenian, Budaya Lokal, dan Benda Situs Cagar Budaya Yang Dilestarikan dengan pengendalian resiko yang ada Fasilitas Pagelaran Seni dan Budaya serta Pembinaan Kelompok Seni dan Budaya.
4. Menurunnya Nilai SAKIP Perangkat dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni: (1) Pengawasan dari Inspektorat atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tiap Triwulan, (2) Laporan Realisasi Kinerja Triwulan.

Selain itu kegiatan yang sudah dilakukan Dinas Pariwisata Kab. Lamongan untuk mengatasi resiko operasional sebagai berikut :

1. Kerusakan SARPRAS di ODTW dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni melakukan Pemeliharaan Rutin.
2. Bencana Alam dengan pengendalian resiko yang sudah ada yakni koordinasi Lintas OPD terkait Bencana Alam.
3. Terbatasnya Informasi terkait Usaha Pariwisata dengan pengendalian resiko yang sudah ada Monitoring dan Evaluasi Usaha Pariwisata.
4. Kurang Maksimalnya Promosi Wisata dengan pengendalian resiko yang sudah ada yaitu kolaborasi para stakeholder dalam promosi wisata.
5. Kurang Berkembangnya SDM Pariwisata dan Ekraf dengan pengendalian resiko yang sudah ada yaitu melaksanakan BIMTEK bagi SDM Pariwisata dan Ekraf.
6. Minimnya Pengelolaan Kegiatan Tradisi Budaya dengan pengendalian resiko yang sudah ada yaitu Memberikan Dukungan Fasilitas Terhadap Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan.
7. Minimnya Event Kesenian Bagi Kelompok seni dengan pengendalian resiko yang sudah ada yaitu mengadakan event-event seni.
8. Kurangnya Kualitas SDM Kelompok Seni dengan pengendalian resiko yang sudah ada yaitu Pengiriman Kelompok Seni Untuk Mengikuti Lomba/ Festival.
9. Kurangnya SDM Profesional Dalam Bidang Cagar Budaya

- dengan pengendalian resiko yang sudah ada yaitu Bekerjasama dengan Balai PelestariaKebudayaan II Provinsi JATIM terkait Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)
10. Museum kurang maksimal dalam beroperasi dengan pengendalian resiko yang sudah ada yaitu melakukan pemeliharaan rutin.

Penyelenggaraan kegiatan pengendalian lebih diutamakan pada kegiatan pokok organisasi dan relevan dengan hasil kegiatan penilaian risiko, sehingga pelaksanaan kegiatan pengendalian mampu membantu memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai.

E. PENGENDALIAN YANG MASIH DIBUTUHKAN

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu tindakan preventif dan mitigasi. Pengendalian yang bersifat preventif merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat mitigasi merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko.

Dalam setiap tindakan pengendalian yang telah dilakukan oleh masing-masing unit kerja akan masih ada celah pengendalian yang dapat memberikan dampak buruk bagi pencapaian tujuan suatu organisasi. Sehingga perlu di bangun tindakan pengendalian yang masih dibutuhkan untuk masing-masing resiko baik resiko stratgeis maupun operasional sebagai berikut :

Tabel III.7 Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

Uraian Resiko	Pengendalian Yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian
Resiko Strategis			
Menurunnya Kunjungan Wisatawan	Penggunaan berbagai media untuk promosi wisata baik media cetak, elektronik, online, media sosial	Kurang menguasai penggunaan beberapa media yang dapat dimanfaatkan untuk promosi	Kerja sama dengan pihak ke-3 dalam pengelolaan media tertentu terkait promosi wisata dan kebudayaan

Uraian Resiko	Pengendalian Yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian
Praktik Penarikan Retribusi yang tidak sesuai ketentuan	1.SOP Penerimaan dan Penyetoran Retribusi 2.PERDA No. 10 Tahun 2023	Pelaksanaan SOP dan Perda No.10 Tahun 2023 belum maksimal	Peningkatan Pengawasan Internal terkait pelaksanaan SOP dan Perda No. 10 Tahun 2023
Menurunnya Kegiatan Pelestarian Kesenian, Budaya Lokal, dan Benda Situs Cagar Budaya Yang Dilestarikan	Fasilitasi Pagelaran Seni dan Budaya serta Pembinaan Kelompok Seni dan Budaya	Belum semua fasilitasi dan pembinaan mengakomodir kebutuhan	mengadakan pagelaran secara kontinuitas dan pembukaan ruang ekspresi
Menurunnya Nilai SAKIP Perangkat Daerah	1. Pengawasan dari Inspektorat atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tiap Tribulan 2. Laporan Realisasi Kinerja Tribulan.	Ada rekomendasi yang belum ditindaklanjuti	Rapat Semesteran Internal Disparbud terkait Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Resiko Operasional			
Kerusakan SARPRAS di ODTW	Tidak semua Kegiatan Pemeliharaan mencakup Sarpras yang Rusak	Usaha Penghapusan atau Kegiatan Perbaikan sarpras	Kepala Bidang Pariwisata
Bencana Alam	Koordinasi Lintas OPD terkait Bencana Alam	Anggaran terkait penanganan bencana alam menjadi tanggung jawab OPD lain	melakukan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana pada Destinasi Wisata
Terbatasnya Informasi terkait Usaha Pariwisata	Monetering dan Evaluasi Usaha Pariwisata	Tidak semua informasi terkait usaha pariwisata didapatkan melalui kegiatan monetering dan evaluasi Usaha Pariwisata	Menjaring informasi melalui media sosial atau kunjungan langsung ke tempat usaha pariwisata

Uraian Resiko	Pengendalian Yang Sudah Ada	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian
Kurang Maksimalnya Promosi Wisata	Kolaborasi Para Stakeholder dalam Promosi Pariwisata	Dukungan Stakeholder Fluktuatif	Evaluasi Kerjasama dan Memperkuat Kolaborasi secara Kontinu
Kurang Berkembangnya SDM Pariwisata dan Ekraf	Melaksanakan BIMTEK bagi SDM Pariwisata dan Ekraf	Kemauan Pribadi SDM Pariwisata dan Ekraf Rendah	Membentuk Komunitas SDM Pariwisata dan Ekraf
Minimnya Pengelolaan Kegiatan Tradisi Budaya	Memberikan Dukungan Fasilitasi Terhadap Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan	Dukungan Tidak Menjangkau Semua Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan	Meningkatkan Fasilitasi dalam Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan
Minimnya Event Kesenian Bagi Kelompok Seni	Mengadakan Event-Event Seni	Event Seni yang Diadakan Tidak Menjangkau Seluruh Kelompok Seni	Memperbanyak Event Seni
Kurangnya Kualitas SDM Kelompok Seni	Pengiriman Kelompok Seni Untuk Mengikuti Lomba/ Festival	Keterbatasan Event Seni	Memperbanyak Event Seni
Kurangnya SDM Profesional Dalam Bidang Cagar Budaya	Bekerjasama dengan Balai Pelestarian Kebudayaan II Provinsi JATIM terkait Tim Ahli Cagar Budaya (TACB)	Keterbatasan Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) Balai Pelestarian Kebudayaan II Provinsi JATIM	Pengajuan Pengusulan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Lamongan ke Kementrian
Museum kurang maksimal dalam beroperasi	Melakukan Pemeliharaan Rutin	Kurang Maksimalnya Fungsi Museum	Pengoprasian Museum Daerah

IV. RANCANGAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi adalah data yang telah diolah dan dijadikan dasar pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dengan menggunakan media tertentu, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan umpan balik yang konstruktif.

Guna mendukung berjalanya lingkungan pengendalian yang dibangun, maka diperlukan media untuk menyampaikan masing-masing unsur lingkungan pengendalian. Media penyampaian informasi yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lamongan pada resiko strategis sebagai berikut :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi
Risiko Strategis OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan:				
1	Kerja sama dengan pihak ke-3 dalam pengelolaan media tertentu terkait promosi wisata dan kebudayaan	Nota Dinas Pengkomunikasian Risiko Strategis DISPARBUD beserta Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Sekretaris Dinas pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Bidang, Pejabat fungsional, Pejabat Struktural, Staf
2	Peningkatan Pengawasan Internal terkait pelaksanaan SOP dan Perda No. 10 Tahun 2023	Nota Dinas Pengkomunikasian Risiko Strategis DISPARBUD beserta Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Sekretaris Dinas pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Bidang, Pejabat fungsional, Pejabat Struktural, Staf

Gambar 5 Lampiran Form 8 Infokom Resiko Strategis Si Mario
Urusan Pariwisata

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi
Risiko Strategis OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan:				
1	mengadakan pagelaran secara kontinuitas dan pembukaan ruang ekspresi	Nota Dinas Pengkomunikasian Risiko Strategis DISPARBUD beserta Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Bidang, Pejabat fungsional, Pejabat Struktural, Staf
2	Rapat Semesteran Internal Disparbud terkait Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Nota Dinas Pengkomunikasian Risiko Strategis DISPARBUD beserta Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Kepala Bidang, Pejabat fungsional, Pejabat Struktural, Staf

Gambar 6 Lampiran Form 8 Infokom Resiko Strategis Si Mario
Urusan Kebudayaan

Media penyampaian informasi pada resiko operasional yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Lamongan sebagai berikut :

Risiko Operasional OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan:			
1 Usaha Penghapusan atau Kegiatan Perbaiki sarpras	Nota Dinas Pengkomunikasian Risiko Operasional DISPARBUD beserta Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kepala Bidang Pariwisata dan Pemasaran, Pejabat fungsional dan Staff Bidang Pariwisata dan Pemasaran
2 melakukan kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana pada Destinasi Wisata	Nota Dinas Pengkomunikasian Risiko Operasional DISPARBUD beserta Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kepala Bidang Pariwisata dan Pemasaran, Pejabat fungsional dan Staff Bidang Pariwisata dan Pemasaran
3 Menjaring informasi melalui media sosial atau kunjungan langsung ke tempat usaha pariwisata	Nota Dinas Pengkomunikasian Risiko Operasional DISPARBUD beserta Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kepala Bidang Pariwisata dan Pemasaran, Pejabat fungsional dan Staff Bidang Pariwisata dan Pemasaran
4 Evaluasi Kerjasama dan Memperkuat Kolaborasi secara Kontinu	Nota Dinas Pengkomunikasian Risiko Operasional DISPARBUD beserta Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kepala Bidang Pariwisata dan Pemasaran, Pejabat fungsional dan Staff Bidang Pariwisata dan Pemasaran
5 Membentuk Komunitas SDM Pariwisata dan Ekraf	Nota Dinas Pengkomunikasian Risiko Operasional DISPARBUD beserta Kegiatan Pengendalian Yang Dibutuhkan	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kepala Bidang Pariwisata dan Pemasaran, Pejabat fungsional dan Staff Bidang Pariwisata dan Pemasaran

Gambar 7 Lampiran Form 8 Infokom Resiko Operasional Si Mario
Urusan Pariwisata

Risiko Operasional OPD Dinas Pariwisata dan Kebudayaan:			
1 Meningkatkan Fasilitasi dalam Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan	Nota Dinas Pengkomunikasian Risiko Operasional DISPARBUD beserta Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kepala Bidang Kebudayaan, Pejabat Fungsional dan Staf Bidang Kebudayaan
2 Memperbanyak Event Seni	Nota Dinas Pengkomunikasian Risiko Operasional DISPARBUD beserta Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kepala Bidang Kebudayaan, Pejabat Fungsional dan Staf Bidang Kebudayaan
3 Memperbanyak Event Seni	Nota Dinas Pengkomunikasian Risiko Operasional DISPARBUD beserta Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kepala Bidang Kebudayaan, Pejabat Fungsional dan Staf Bidang Kebudayaan
4 Pengajuan Pengusulan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Lamongan ke Kementrian	Nota Dinas Pengkomunikasian Risiko Operasional DISPARBUD beserta Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kepala Bidang Kebudayaan, Pejabat Fungsional dan Staf Bidang Kebudayaan
5 Pengoprasian Museum Daerah	Nota Dinas Pengkomunikasian Risiko Operasional DISPARBUD beserta Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan	Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Kepala Bidang Kebudayaan, Pejabat Fungsional dan Staf Bidang Kebudayaan

Gambar 8 Lampiran Form 8 Infokom Resiko Operasional Si Mario
Urusan Kebudayaan

Dalam rangka pelaksanaan manajemen resiko informasi dan komunikasi penting untuk dilakukan agar dapat mengintegrasikan pelaksanaan komponen pengendalian yang telah di susun secara efektif. Terutama dalam hal terkait langsung dengan pencapaian tujuan organisasi agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang di inginkan.

V. RANCANGAN PEMANTAUAN

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang diterapkan, telah berjalan secara efektif mengatasi resiko dan apakah langkah-langkah perbaikan telah dilaksanakan. Pemantauan berkelanjutan yang perlu dilakukan meliputi pemantuan penyusunan Perda dan Perbup, Penyaluran dan pencairan dana, Pelaksaan APBD, pengamanan asset serta pelaksanaan RTP.

Bentuk atau metode pemantauan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Lamongan adalah dengan senantiasa melakukan pendampingan secara langsung dengan melakukan rekonsiliasi tiap bulan, tribulanan bahkan semesteran. Serta melakukan monitoring dengan menggunakan aplikasi Keuangan Daerah baik aplikasi internal seperti SAKTI, SIPPLA, e-asset, maupun aplikasi nasional seperti SIPD.

VI. PENUTUP

Pelaporan manajemen risiko ini dilakukan sebagai wujud proses atas tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan yang telah ditetapkan organisasi. Dokumen ini menjadi instrumen untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif dan efisien dalam mencapai tujuan/sasaran.

Komitmen dari segenap unit kerja dan seluruh pegawai serta ditunjang sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian, sehingga dapat menekan risiko yang mungkin terjadi secara bertahap dan berkelanjutan.

Serta menganalisis kembali apakah tindakan pengendalian di perlukan perbaikan sebagai dasar pertimbangan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini dan perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya.

Lamongan, April 2024
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMONGAN

SITI RUBUKAH, S.E., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700607 199803 2 003